

Pola Penggunaan Input Produksi dan Distribusi Output dalam Sistem Bagi Hasil di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Sharfina Nabilah*, Efendy

¹Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Email: sharfina@unram.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola penggunaan input produksi dan distribusi output dalam sistem bagi hasil di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu secara sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Woja terdapat banyak petani yang menerapkan sistem bagi hasil. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode quota sampling, yaitu sebanyak 60 responden. Penentuan responden menggunakan metode accidental sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data primer dan dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan pola penggunaan input produksi dan distribusi output, serta perhitungan proporsi biaya dan hasil dalam sistem bagi hasil. Hasil menunjukkan bahwa dalam pola penggunaan input produksi, penggarap menanggung beban biaya lebih besar, yaitu 61,36% dari total biaya, sedangkan pemilik lahan hanya menanggung 38,64%. Sementara itu, distribusi output hasil panen tetap dibagi rata 50:50, dengan masing-masing pihak menerima 3.095,84 kg dari total produksi 6.191,68 kg per hektar. Pola pembagian ini mencerminkan prinsip keadilan normatif, namun ketika dikaitkan dengan kontribusi biaya, terjadi ketidakseimbangan antara peran input dan pembagian hasil, sehingga perlu penyesuaian mekanisme bagi hasil agar lebih proporsional.

Katakunci: Bagi-hasil, Distribusi, Produksi, Usahatani, Woja

ABSTRACT

This study aims to analyze the patterns of production input usage and output distribution in the sharecropping system in Woja Subdistrict, Dompu Regency. The study employed purposive sampling, considering the high prevalence of sharecropping in the area, with a sample of 60 respondents selected using accidental sampling. Both qualitative and quantitative data were collected from primary and secondary sources. Quantitative descriptive analysis was used to illustrate input usage and output distribution patterns, as well as to calculate cost and output proportions. The results show that sharecroppers bear a larger share of production costs (61.36%) compared to landowners (38.64%), while the harvested output is equally divided at 50:50, with each party receiving 3,095.84 kg from a total of 6,191.68 kg per hectare. Although this distribution reflects normative fairness, the imbalance between cost contribution and output allocation suggests the need for a more proportional sharecropping mechanism.

Keywords: Distribution, Farming, Production, Sharecropping, Woja

PENDAHULUAN

Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap. Pertanian menjadi sumber utama penghidupan masyarakat, sekaligus penyumbang penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, produksi padi di Kabupaten Dompu terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2022 produksi padi tercatat sebesar 83.706 ton dengan luas panen 16.207 hektar. Pada tahun 2023, produksi meningkat menjadi 94.379 ton dengan luas panen 18.978 hektar, dan pada tahun 2024 mencapai 101.625 ton dengan luas panen 21.725 hektar. Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Dompu memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi lokal maupun regional. Data luas panen dan produksi padi tahun 2022-2024 di Kabupaten Dompu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Panen Dan Produksi Padi Tahun 2022-2024 di Kabupaten Dompu

Luas Panen (Hektar)	Produksi Padi (Ton)	Tahun
21,725	101,625	2024
18,978	94,379	2023
16,207	83,706	2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025

Meskipun capaian produksi menunjukkan peningkatan, sistem pengelolaan lahan pertanian di Kabupaten Dompu tidak seluruhnya dilakukan oleh pemilik lahan. Sebagian besar lahan justru dikelola melalui mekanisme kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Salah satu sistem kerja sama yang paling banyak dipraktikkan adalah sistem bagi hasil (*sharecropping system*). Kecamatan Woja merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Dompu yang masih banyak terdapat praktik sistem bagi hasil. Sistem ini muncul sebagai solusi bagi keterbatasan kepemilikan lahan dan modal, sehingga pemilik tanah dapat tetap memanfaatkan lahan secara produktif, sementara penggarap memperoleh kesempatan bertani meskipun tidak memiliki lahan sendiri.

Namun demikian, dalam praktiknya sistem bagi hasil di Kecamatan Woja tidak selalu seragam. Pola penggunaan input produksi menjadi salah satu aspek yang menunjukkan variasi. Pada sebagian kasus, benih dan pupuk ditanggung penuh oleh pemilik lahan, sementara tenaga kerja menjadi tanggung jawab penggarap. Di tempat lain, biaya produksi dibagi rata antara pemilik dan penggarap. Ada pula kasus di mana penggarap menanggung sebagian besar input, sehingga posisi tawarnya lebih lemah saat pembagian hasil panen. Variasi pola ini mencerminkan adanya perbedaan dalam peran, tanggung jawab, serta risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Selain itu, distribusi output hasil panen dalam sistem bagi hasil juga menunjukkan pola yang berbeda-beda. Umumnya digunakan perbandingan 50:50 (hasil panen dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap) atau 60:40 (pemilik lahan mendapat bagian lebih besar). Akan tetapi, dalam praktiknya, proporsi pembagian tersebut sering kali dipengaruhi oleh kontribusi input yang diberikan. Apabila pemilik lahan menanggung sebagian besar biaya produksi, maka pembagian hasil lebih besar ke pemilik. Sebaliknya, jika penggarap yang menanggung lebih banyak input, ia akan menuntut porsi hasil yang lebih besar. Ketidakteraturan pola distribusi output ini dapat menimbulkan potensi ketidakadilan, terutama bila salah satu pihak merasa dirugikan oleh kesepakatan.

Sistem bagi hasil yang berkembang di Kecamatan Woja memiliki peran strategis dalam mempertahankan produktivitas pertanian, tetapi juga mengandung tantangan terkait keberlanjutan hubungan kerja sama. Jika mekanisme pembagian input dan output tidak dikelola dengan adil, maka dapat muncul konflik kepentingan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan motivasi kerja penggarap dan berdampak pada produktivitas pertanian secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila pola yang diterapkan mampu menciptakan keseimbangan, sistem bagi hasil akan menjadi mekanisme yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan kajian ilmiah mengenai pola penggunaan input produksi dan distribusi output dalam sistem bagi hasil di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran nyata tentang praktik yang berlangsung di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendorong terciptanya sistem bagi hasil yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, bukan hanya pemilik lahan dan penggarap yang memperoleh manfaat, tetapi juga pertanian di Woja secara keseluruhan dapat berkembang secara optimal dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu secara sengaja (*purposive sampling*) dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Woja terdapat banyak petani yang menerapkan sistem bagi hasil. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *quota sampling*, yaitu sebanyak 60 responden. Penentuan responden menggunakan metode *accidental sampling*, yakni siapa saja petani penggarap yang ditemui di lapangan dan memenuhi kriteria penelitian. Teknik ini dipilih karena dianggap efektif untuk memperoleh data lapangan secara langsung pada kelompok sasaran (Sugiyono, 2017).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada responden. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, serta literature akademik terkait sistem bagi hasil dan ekonomi pertanian (Arikunto, 2019; Nazir, 2014).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menghitung proporsi biaya dan distribusi hasil antara pemilik lahan dan penggarap, serta membandingkannya dengan temuan penelitian sebelumnya. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola penggunaan input produksi dan distribusi output pada sistem bagi hasil (Wirartha, 2006; Creswell, 2016). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penggunaan Input Produksi

Secara umum, penggunaan input dalam usahatani dapat dirumuskan sebagai berikut (Soekartawi, 2002):

$$TC_{\text{pemilik}} = FC_{\text{pemilik}} + VC_{\text{pemilik}}$$

$$TC_{\text{penggarap}} = FC_{\text{penggarap}} + VC_{\text{penggarap}}$$

Dimana:

TC= Total Cost

FC= Fixed Cost

VC= Variable Cost

ini merujuk pada pendekatan analisis biaya produksi (Edy et al., 2023) yang menyatakan bahwa biaya produksi dalam kegiatan usahatani dapat dibedakan menjadi dua komponen utama, yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*).

2. Analisis Distribusi Output

Rumus pembagian hasil panen dengan sistem bagi hasil menggunakan proporsi tertentu (α untuk pemilik dan β untuk penggarap) sejalan dengan konsep dasar teori bagi hasil dalam ekonomi pertanian (Mubyarto, 1989).

$$Q_{\text{pemilik}} = \alpha \times Q ; Q_{\text{penggarap}} = \beta \times Q$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap yang masih banyak ditemui dalam kegiatan pertanian tradisional, termasuk di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Dalam sistem ini, terdapat dua aspek penting yang menentukan keberlanjutan hubungan kerja sama, yaitu pola penggunaan input produksi dan distribusi output hasil panen.

Pola Penggunaan Input Produksi

Sistem bagi hasil di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, pembagian tanggung jawab input produksi bervariasi antara pemilik lahan dengan penggarap. Pada umumnya, pemilik lahan menanggung biaya tetap berupa pajak lahan, sedangkan penggarap menanggung biaya tetap berupa penyusutan alat. Biaya variabel yang ditanggung oleh pemilik lahan yaitu biaya pupuk, sedangkan biaya variabel yang ditanggung penggarap yaitu benih, pestisida, dan tenaga kerja. Selain biaya tersebut, terdapat biaya yang ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap, yaitu iuran pengairan. Berikut adalah Tabel 2 yang menggambarkan pola alokasi biaya produksi yang ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap dalam sistem bagi hasil di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Tabel 2. Alokasi Biaya Produksi per Hektar pada Sistem Bagi Hasil di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

No	Uraian	Proporsi (%) Pemilik : Penggarap	Pemilik (Rp)	Penggarap (Rp)
1	Biaya Tetap			
	Iuran pengairan	50 : 50	303.333,33	303.333,33
	Penyusutan alat	0 : 100	0	132.602,78
	Pajak lahan	100 : 0	100.116,67	0
2	Biaya Variabel			
	Benih	0 : 100	0	329.116,67
	Pestisida	0 : 100	0	761.800,00
	Pupuk	100 : 0	1.031.333,33	0
	Tenaga Kerja:			
	▪ Pengolahan lahan	0 : 100	0	1.440.000,00
	▪ Penanaman	0 : 100	0	151.666,67
	▪ Pemupukan	0 : 100	0	151.666,67
	▪ Pengendalian hama	0 : 100	0	151.666,67
	▪ Pemanenan	50 : 50	1.364.250,00	1.364.250,00
	▪ Pengangkutan	50 : 50	581.266,67	581.266,67
3	Total Biaya Produksi		3.380.300,00	5.367.369,44

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, pada lahan garapan seluas 1 hektar di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, total biaya produksi tercatat sebesar Rp8.747.669,44. Dari jumlah tersebut, pemilik lahan menanggung biaya sebesar Rp3.380.300,00 atau sekitar 38,64%, sedangkan penggarap menanggung Rp5.367.369,44 atau 61,36% dari total biaya produksi. Data ini menunjukkan bahwa penggarap menanggung beban biaya

yang lebih besar dibandingkan pemilik lahan. Pola demikian memperlihatkan adanya ketidakseimbangan tanggungan biaya, di mana kontribusi penggarap tidak hanya mencakup tenaga kerja, tetapi juga input produksi utama seperti benih, pestisida, dan tenaga kerja.

Temuan ini sejalan dengan studi (Anwar & Mukarromah, 2023) di Bondowoso yang menunjukkan bahwa sistem bagi hasil seringkali menimbulkan ketimpangan. Dalam kondisi kerugian, penggarap tetap menanggung beban biaya yang besar, sementara pemilik relatif lebih terlindungi. Senada dengan hal tersebut, penelitian Bawohan et al., (2021) serta Kurniawan et al., (2021) menegaskan bahwa sebagian besar biaya produksi dalam usahatani umumnya ditanggung oleh penggarap, sehingga berimplikasi pada lebih rendahnya pendapatan bersih yang mereka peroleh. Meskipun demikian, pola pembagian biaya ini merupakan kesepakatan yang telah mengakar dalam sistem bagi hasil di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Mekanisme tersebut tidak hanya didasarkan pada kepemilikan lahan, tetapi juga pada kontribusi nyata dalam bentuk tenaga kerja dan input produksi. Dengan demikian, meskipun terdapat ketimpangan proporsi biaya, sistem ini tetap dijalankan sebagai bentuk kesepakatan sosial-ekonomi antara pemilik dan penggarap.

Distribusi Output

Distribusi output hasil panen di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu umumnya menggunakan pola 50:50. Artinya, dari total hasil panen, pemilik lahan dan penggarap masing-masing memperoleh separuh. Pembagian ini belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara input yang dikeluarkan dengan hasil yang diterima. Dalam konteks ini, penggarap berpotensi menanggung risiko lebih besar karena terlibat langsung dalam proses produksi, sementara pemilik lahan relatif lebih aman dengan kontribusi terbatas. Berikut adalah Tabel 3 yang menunjukkan distribusi output usahatani padi dalam bentuk gabah kering berdasarkan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Tabel 3. Distribusi Output Usahatani Padi Berdasarkan Sistem Bagi Hasil di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Uraian	Proporsi (%) Pemilik : Penggarap	Pemilik (Kg)	Penggarap (Kg)
Gabah kering	50 : 50	3.095,84	3.095,84
Total		6.191,68	

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tabel 3 menunjukkan distribusi output usahatani padi dalam bentuk gabah kering di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang didasarkan pada sistem bagi hasil 50:50. Dari total produksi gabah kering sebesar 6.191,68 kg per hektar, masing-masing pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap, memperoleh bagian yang sama, yaitu 3.095,84 kg. Pola pembagian ini mencerminkan kesepakatan tradisional yang masih banyak diterapkan di wilayah penelitian, di mana hasil panen dibagi rata meskipun kontribusi biaya produksi antara pemilik dan penggarap tidak seimbang. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, penggarap menanggung 61,36% dari total biaya produksi, sedangkan pemilik hanya menanggung 38,64%. Ketidakseimbangan ini menimbulkan persoalan keadilan karena penggarap menanggung beban biaya yang lebih besar, namun memperoleh bagian hasil yang sama dengan pemilik lahan.

Fenomena serupa ditemukan oleh (Haryanto & Kurniaji, 2023) dalam studi mereka di Tangerang, di mana praktik bagi hasil padi juga menerapkan pola 50:50 antara pemilik dan penggarap. Meskipun sistem ini dianggap mampu menjaga keberlanjutan usahatani, beban biaya yang lebih besar di pihak penggarap sering kali mengurangi keuntungan bersih yang diterima, sehingga berdampak pada

rendahnya tingkat kesejahteraan petani penggarap. Dari perspektif hukum agraria, ketidakadilan ini telah lama menjadi perhatian. Tamsil et al., (2018) menegaskan bahwa sistem bagi hasil di Indonesia pada umumnya menempatkan petani penggarap dalam posisi lemah akibat relasi patron-klien yang tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan intervensi regulasi yang lebih tegas untuk menata ulang mekanisme bagi hasil agar lebih adil serta melindungi kepentingan penggarap.

Selain itu, Syuaib (2016) mengingatkan bahwa keberlanjutan pertanian di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produktivitas, tetapi juga oleh keadilan dalam distribusi hasil antara pemilik modal dan tenaga kerja. Ketimpangan dalam pembagian hasil berpotensi menimbulkan masalah sosial dan dapat melemahkan semangat penggarap untuk memproduksi secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Krismantoro (2024) melalui kajian reformasi agraria menekankan pentingnya pembaruan sistem distribusi hasil pertanian yang lebih berpihak pada kesejahteraan petani kecil. Menurutnya, praktik bagi hasil yang tidak sebanding dengan proporsi biaya produksi justru berpotensi memperburuk ketimpangan agraria di pedesaan, sehingga dibutuhkan pendekatan hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, sistem bagi hasil 50:50 di Kecamatan Woja, meskipun sederhana dan mudah dipahami masyarakat, masih menyisakan persoalan keadilan karena tidak memperhitungkan proporsi biaya produksi yang lebih besar di pihak penggarap. Kondisi ini mengindikasikan perlunya revisi kesepakatan atau pembaruan regulasi agar mekanisme bagi hasil dapat lebih adil, sehingga penggarap memperoleh bagian hasil yang sepadan dengan kontribusi biaya dan tenaga yang telah mereka keluarkan

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pola penggunaan input produksi, penggarap menanggung beban biaya lebih besar, yaitu 61,36% dari total biaya, sedangkan pemilik lahan hanya menanggung 38,64%. Sementara itu, distribusi output hasil panen tetap dibagi rata 50:50, dengan masing-masing pihak menerima 3.095,84 kg dari total produksi 6.191,68 kg per hektar. Pola pembagian ini mencerminkan prinsip keadilan normatif, namun ketika dikaitkan dengan kontribusi biaya, terjadi ketidakseimbangan antara peran input dan pembagian hasil, sehingga perlu penyesuaian mekanisme bagi hasil agar lebih proporsional.

Disarankan agar penggarap dan pemilik lahan bekerja sama dalam mengatur penggunaan input dan pembagian hasil agar lebih seimbang dan adil bagi kedua belah pihak. Untuk penelitian selanjutnya, dianjurkan mengeksplorasi alternatif model bagi hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Z., & Mukarromah, M. (2023). Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 84–98. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3430>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bawohan, A. R., Katiandagho, T. M., & Sondakh, M. F. L. (2021). Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 17(2), 195. <https://doi.org/10.35791/agrsossek.17.2.2021.33836>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edy, S., Alzarliani, W. O., Santika, N., & Amin, M. N. (2023). Analisis Pendapatan Usahatani Padi Sawah Di Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 252–260. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.442>

- Haryanto, L. in, & Kurniaji, A. Z. (2023). How Can Rice Farmers Gain Profit? An Analysis of Sharecropping Practice among Farmers, Landowners, and Laborers in Sukadiri Subdistrict of Tangerang. *Kawistara Jurnal The Journal of Social Sciences and Humanities Vol.13, 13*(3), 342–356.
- Krismanoro, D. (2024). Exploring Agrarian Reform Laws in Indonesia. *Journal of Ecohumanism, 3*(8), 8894–8901. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5504>
- Kurniawan, D., Ananda, C. F., S, P. M. A., & Khusaini, M. (2021). The Effect of Transaction Costs on The Benefits of Hybrid Maize Farming in Dompu District, West Nusa Tenggara. *Journal of International Conference Proceedings, 4*(1), 162–172. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i1.1137>.
- Mubyarto. (1989). Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekartawi. (2002). Analisis Usahatani. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (13th ed.). Alfabeta.
- Syuaib, M. F. (2016). Sustainable agriculture in indonesia: Facts and challenges to keep growing in harmony with environment. *Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 18*(2), 170–184.
- Tamsil, Susilowati, I. F., & Wardhana, M. (2018). Perspective of public law in rearrangement of profit sharing system agricultural land in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series, 953*(1), 0–5. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012166>
- Wirartha, I. M. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Andi.